

AKTUALISASI PERAN GURU SEKOLAH DASAR SEBAGAI PENDIDIK KARAKTER BANGSA

by Yosef Yosef

Submission date: 18-Apr-2023 09:15AM (UTC+0700)

Submission ID: 2067870848

File name: I_PERAN_GURU_SEKOLAH_DASAR_SEBAGAI_PENDIDIK_KARAKTER_BANGSA.docx (23.78K)

Word count: 2732

Character count: 18561

AKTUALISASI PERAN GURU SEKOLAH DASAR SEBAGAI PENDIDIK KARAKTER BANGSA

Yosef

PGSD, FKIP Universitas Sriwijaya

1. Pendahuluan

Kekhawatiran bangsa Indonesia akan kehilangan jati diri di tengah-tengah pergaulan internasional terkait dengan maraknya berbagai tindak kekerasan, penyerapan budaya bangsa lain tanpa penyaringan, etos kerja yang tidak setinggi bangsa-bangsa lain berakhir dengan solusi politis, yakni membangun kembali jati diri bangsa. Tindak lanjut solusi politis ialah memberlakukan pendidikan budaya dan karakter bangsa di sekolah. Istilah yang lebih banyak beredar ialah pendidikan karakter bangsa (PKB). Keputusan responsif yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Nasional berimplikasi pada praktik terbaik mana yang patut dicontoh untuk melaksanakan PKB di sekolah, termasuk di SD. SD sebagai lembaga pendidikan utama dalam penyiapan pendidikan lanjut dalam tata pendidikan formal memiliki beban yang paling berat. Asumsinya ialah SD menumbuhkan dan sekolah lanjut mengembangkan. Kegagalan dalam menumbuhkan karakter bangsa di tingkat dasar akan mengganggu pengembangan di tingkat lanjut.

Persoalan besar yang perlu dijawab oleh masyarakat pendidikan terkait dengan keterpentingan SD dalam melaksanakan PKB terletak praktik terbaik pembelajarannya. Guru sebagai individu adalah anggota masyarakat yang sedang diprihatinkan terkait dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Sanggupkah guru SD sebagai pendidik profesional menemukan praktik terbaik dalam pembelajaran PKB yang terintegrasi di dalam pembelajaran tematik atau mata pelajaran? Guna membangun pemahaman yang jelas tentang peran guru SD sebagai pengembang karakter bangsa, pertama-tama patut didiskusikan berbagai perspektif tentang guru sekolah dan institusi SD, perkembangan anak usia sekolah dasar, pendidikan karakter bangsa, dan peran guru sebagai pembimbing. Selanjutnya perlu didiskusikan integrasi semua persepektif guna menggagas rambu-rambu praktik terbaik PKB.

2. Perspektif Pendidikan Karakter Bangsa

Pendidikan karakter bangsa secara substantif bukan perkara baru bagi bangsa Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia terdahulu melaksanakan pendidikan budi

pekerti yang jika dianalisis tidak terlalu berbeda dari PKB saat ini. Perubahan kepribadian kolektif masyarakat saat inilah yang mendorong pimpinan bangsa untuk mengambil keputusan tentang pentingnya PKB.

Hasan dkk. (2010) mendaftar delapan belas karakter yang diharapkan dikembangkan oleh peserta didik, termasuk di SD. Karakter tersebut memuat nilai-nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Jika kedelapan belas karakter dicermati tampak bahwa siswa SD sebagian telah memiliki karakter tersebut dan membawanya ke sekolah. Orang tua sebagai pengasuh, sosialisir,dan pendidik pertama dan utama (Berger, 1995 p. 2) diyakini telah menumbuhkan sebagian karakter dimaksud. Kontinuitas pendidikan karakter di keluarga dan sekolah merupakan prasyarat keberhasilan PKB. Komunitas pendidikan tentu menunggu peran guru dalam PKB.

Hasan dkk. (2010) berpendapat bahwa pengembangan budaya dan karakter bangsa tidak dilaksanakan dalam satu mata pelajaran khusus, melainkan terpadu di dalam mata pelajaran yang ada. Melalui integrasi ini siswa diharapkan mengenal dan menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa ke dalam diri mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Dengan prinsip ini, peserta didik belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Kemudian, kedelapan belas karakter tersebut tidak semuanya harus diajarkan di sekolah. Sekolah dapat memilih nilai nilai yang akan dikembangkan berdasarkan asesmen kebutuhan. Kejujuran, toleransi, dan semangat kebangsaan adalah beberapa dari nilai-nilai yang perlu diutamakan jika melihat fenomena terkini.

3. Perspektif Legal Guru dan Institusi Sekolah Dasar

Penyelenggaraan SD memiliki landasan hukum yang jelas. Landasan hukum memberikan arah tentang apa dan bagaimana SD diselenggarakan. UU Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 17 Ayat 1 menyatakan bahwa "Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah". SD berkedudukan sebagai salah satu jenjang bagian dari pendidikan dasar. Guna menjabarkan peran SD tersebut pemerintah meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 26 Ayat 1 PP ini menyebutkan tentang standar

kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar, yakni bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pencapaian tujuan dimaksud difasilitasi oleh para pendidik yang di dalam Pasal 30 Ayat 2 disebut sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan. Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan. Kemudian, kualifikasi akademik para pendidik di SD ditetapkan "(a)... minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan (c) sertifikat profesi guru untuk SD/MI". Sementara itu, Pasal 35 Ayat 1 (b) menyebutkan bahwa "SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

Pernyataan peraturan dan perundang-undangan di atas menunjukkan bahwa pertama, pendidikan di SD bersifat fundamental bagi pendidikan lanjutannya. SD berkewajiban membekali peserta didik dengan seperangkat kompetensi yang akan dikembangkan lebih lanjut di SMP. Kegagalan SD dalam menyiapkan lulusan yang kompeten akan berpengaruh pada kinerja lanjut siswa. Mereka akan mengalami kesulitan dan ketertinggalan dalam mengikuti pendidikan jenjang menengah.

Kedua, pendidik di SD harus memiliki kualifikasi akademik yang memadai, setingkat sarjana dan memiliki sertifikat pendidik. Sejarah penyiapan guru SD selama dua puluh tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Sampai akhir tahun 1990/1991, SPG (Sekolah Pendidikan Guru) merupakan satu-satunya lembaga pendidikan calon pendidik siswa SD setingkat sekolah menengah atas. Pada tahun 1990/1991 lembaga ini ditutup dan diganti menjadi Program D-II PGSD di bawah Direktorat Pendidikan Tinggi. Perkembangan lanjut, pada tahun 2006 Program D-II diubah menjadi Program Studi S-1 PGSD. Seturut dengan perundang undangan baru bahwa calon guru sekolah dasar harus memiliki sertifikat pendidik, maka sejak tahun 2010 diselenggarakan pendidikan profesi PPG (Pendidikan Profesi Guru) di sejumlah perguruan tinggi terpilih.

Persoalan penting terkait dengan kompetensi guru SD terkini ialah sebagian besar pendidik belum memenuhi persyaratan pendidikan minimal S1, satu jenjang yang memungkinkan pelaku pendidikan mampu mengembangkan profesionalisme secara mandiri. Guru karena kemampuan akademisnya tersebut mampu menanggapi setiap perubahan sistem pendidikan secara arif, tidak resisten, dan gagap perubahan. Mereka mampu menganalisis dan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kompetensi sebagian besar guru SD yang belum memenuhi standar terkini pendidik profesional dikhawatirkan akan menghambat PKB seperti pada kasus CBSA (cara belajar siswa aktif), dimana pembelajaran aktif bersifat artifisial, ditandai oleh siswa duduk berkelompok sepanjang hari.

Ketiga, jenis layanan pendidikan yang diberikan sangat mendasar, tercermin dari struktur organisasi SD, yakni terdiri atas kepala sekolah, staf tata usaha, petugas kebersihan, dan guru kelas serta guru mata pelajaran tertentu (Pendidikan Agama dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan). Perundang-undangan tidak menyebut secara spesifik adanya profesi lain yang harus diberadakan di sekolah dasar, misalnya konselor sekolah, psikolog pendidikan atau psikologi sekolah, atau guru teknologi informasi seperti di sekolah menengah pertama dan atas. Seandainya suatu SD ingin mempekerjakan profesi dimaksud, secara legal formal, khususnya SD negeri, keberadaannya di luar sistem. Pemerintah tidak menyediakan sistem reward terhadap keberadaannya. Berbeda dari sekolah-sekolah dasar swasta. Kelenturan organisasi sekolah swasta memungkinkan mereka mempekerjakan profesi-profesi dimaksud di dalam sistem pendidikan mereka sebagaimana telah dilakukan oleh sejumlah sekolah ternama.

Kesederhanaan organisasi SD menempatkan guru sebagai satu-satunya pelaku layanan pendidikan di kelas. Peran guru sebagai penyedia layanan dapat dipilah-pilah ke dalam tiga kelompok, yakni (a) pendidik, pengajar, dan pelatih, (b) fasilitator, motivator, demonstrator, mediator, manager, dan evaluator, serta (d) peneliti, inovator, (b) pembimbing dan penasihat.. Jika peran-peran ini dicermati, SD sejatinya memerlukan pelibatan profesi lain yang akan memperkuat posisinya sebagai fondasi untuk pendidikan lanjut. Profesi yang penting disertakan antara lain konselor sekolah seperti di SMP dan SMA, psikolog dengan spesialisasi psikologi perkembangan.

4. Perspektif Perkembangan Siswa Sekolah Dasar

Dunia pendidikan, termasuk bimbingan dan konseling, telah memanfaatkan berbagai hasil kajian sejumlah cabang psikologi: psikologi perkembangan (anak dan remaja), psikologi belajar, psikologi kognitif, atau psikologi sekolah. Pemanfaatan kajian psikologi utamanya berkaitan pokok-pokok yang bersifat deskriptif maupun eksplanatif, misalnya bagaimana anak usia SD berperilaku, belajar, berpikir, atau berhubungan sosial. Eggen dan Kauchak (1992), Muro dan Kotmann (1995) dan Siegler dan Alibali (2005) menguraikan sejumlah tokoh psikologi yang memberikan sumbangan dimaksud, antara lain Piaget, Erikson, Havighurst, Kolhberg.

Jean Piaget berkontribusi dalam memahami perkembangan kognitif anak. Dari hasil penelitian Piaget diperoleh pengertian bahwa mayoritas anak usia SD berada pada tahap perkembangan operasi konkrit. Anak mampu melakukan konversi ukuran, melakukan penalaran terhadap objek yang ada di lingkungan mereka. Selain itu aspek perhatian dan kemampuan berkomunikasi yang diperlukan dalam belajar perlahan tapi pasti mulai berkembang. Anak usia SD di kelas rendah dapat memusatkan perhatian mereka pada pelajaran meskipun untuk periode waktu yang tidak terlalu panjang seperti anak yang duduk di kelas tinggi.

Dalam perspektif Erikson, anak usia sekolah dasar berada pada tahap kompeten versus inferior (6-12 tahun). Anak-anak pada tahap ini mulai mengembangkan kemampuan membaca, menulis, operasi matematika sederhana. Selain itu mereka juga mulai menjadikan teman sebaya sebagai sumber pemerolehan harga diri, merasa membutuhkan pengakuan dari orang lain dengan cara menunjukkan kemampuan tertentu yang dihargai masyarakat dan mulai mengembangkan perasaan bangga pada prestasi. Apabila anak-anak mendapat dorongan dan penguatan atas inisiatif mereka, mereka mulai merasa kompeten dan percaya terhadap kemampuan mereka untuk mencapai tujuan. Jika sebaliknya yang terjadi, mereka merasa inferior, ragu terhadap kemampuan sendiri dan akhirnya tidak mencapai potensi optimal mereka.

Havighurst memberikan kontribusi signifikan dalam memahami tugas-tugas perkembangan termasuk anak usia SD. Penguasaan tugas-tugas ini merupakan prasyarat keberhasilan ketika mereka memasuki tugas perkembangan usia remaja dan dewasa. Sembilan tugas perkembangan dimaksud, antara lain, (1) belajar kecakapan fisik yang penting untuk permainan dasar, (2) belajar bergaul dengan teman sebaya, (3) membangun sikap utuh sebagai diri sendiri dan sebagai organisme yang tumbuh dan berkembang, (4)

belajar peranan sosial secara pantas sebagai laki laki dan perempuan, (5) mengembangkan kecakapan dasar membaca, menulis, berhitung. (6) mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, (7) mengembangkan kata hati, moralitas, dan skala nilai-nilai, (8) mencapai kemandirian pribadi, dan (9) mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan institusi. Kesembilan tugas perkembangan dapat menjadi acuan bagi guru dalam merumuskan nilai-nilai kehidupan apa saja yang perlu diisikan di dalam pembelajaran di kelas.

Kohlberg pada bagian lain memberikan sumbangan kepada dunia pendidikan tentang perkembangan moral manusia, termasuk pada usia anak SD. Melalui kajian tentang dilema moral, situasi hipotetik yang meminta orang untuk memutuskan sesuatu itu salah atau benar, Kohlberg membuktikan bahwa anak siswa SD mampu bernalar ketika memutuskan mana pilihan yang benar dan mana yang salah. Jika dikaitkan dengan pandangan Piaget, kemampuan kognitif anak memungkinkan mereka untuk berpikir secara konkrit tentang isu-isu moralitas.

5. Perspektif Integrasi

Kesederhanaan struktur organisasi pendidikan di SD berimplikasi pada penambahan peran tunggal guru kelas dalam PKB. Penambahan menuntut perubahan cara pandang guru terhadap peran profesionalnya. Pertama, biarpun substansi PKB secara inheren telah dilaksanakan oleh guru, penekanan PKB dalam konstruksi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di SD menghendaki sistem kerja yang lebih sistematis dibandingkan sistem kerja terdahulu. Keluhan guru bahwa mereka mengalami kesukaran di dalam mengelola waktu belajar dan aktivitas pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan (PAKEM) di dalam pembelajaran tematik atau mata pelajaran untuk mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM) akan bertambah-tambah lagi. Kewajiban untuk mengintegrasikan nilai-nilai PKB di dalam pembelajaran tematik atau pembelajaran setiap mata pelajaran menuntut pengembangan kecakapan tambahan, baik di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Maknanya ialah guru SD memerlukan berbagai macam pelatihan khusus untuk mendesain, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang mengemas PKB di dalamnya, Integrasi PKB ke dalam pembelajaran tematik atau mata pelajaran di SD memerlukan kreativitas tingkat tinggi. Kasus-kasus pembelajaran tematik di SD yang dirilis oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum (BPPPPK) (2007)

patut menjadi pengalaman berharga tentang betapa tidak mudahnya melakukan inovasi di SD. Naskah akademik ini menyoroti kesulitan yang dihadapi guru dalam menguasai konsep dasar pembelajaran tematik. Faktor kualifikasi akademik sebagian besar guru SD pada saat memasuki karir sebagai pendidik yang belum memadai diduga akan menjadi faktor penghambat dalam mengintegrasikan PKB ke dalam pembelajaran tematik atau mata pelajaran.

Solusi terhadap situasi tersebut ialah guru memerlukan pelatihan yang intens, memperkuat jaringan profesi, dan membutuhkan pendampingan dari pemegang otoritas pendidikan atau komunitas peduli pendidikan. Pelatihan yang efektif dengan pendekatan andragogis diperlukan guna membekali guru dengan konsep dasar PKB yang kokoh, strategi efektif dalam mengembangkan desain pembelajaran tematik atau mata pelajaran yang menyertakan PKB di dalamnya, serta melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran yang memenuhi syarat-syarat validitas dan reliabilitas. Pelibatan profesi lain seperti konselor sekolah, psikolog perkembangan, ahli kepribadian, atau motivator diperlukan untuk memberikan wawasan baru kepada guru yang selama ini terkungkung di dunia sendiri. Profesi dimaksud dapat dilibatkan sebagai konsultan atau nara sumber dalam PKB.

Peningkatan jaringan profesi pertama-tama perlu dilakukan melalui pengembangan profesionalisme pada level lokal. Kegiatan musyawarah guru SD yang dilakukan secara rutin perlu ditingkatkan intensitasnya. Guru-guru perlu memusyawarahkan praktik terbaik dalam mengintegrasikan PKB ke dalam pembelajaran di kelas berdasarkan kasus-kasus yang ditemui di sekolah masing-masing. Jika jaringan tingkat lokal sudah kokoh, maka kelompok tersebut dapat memperluas jaringan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan kelompok lain di tanah air guna mendiskusikan persoalan-persoalan yang lebih beragam supaya diperoleh praktik terbaik berskala luas. Pendampingan dari pemegang otoritas pendidikan, seperti pengawas SD sangat diperlukan guna menangkap persoalan-persoalan yang ditemukan di kelas dan selanjutnya memberikan solusi cerdas kepada guru. Karena PKB merupakan persoalan bangsa, komunitas pendidikan dapat memberikan masukan melalui komite sekolah. Komite sekolah selanjutnya mendiskusikan masukan tersebut bersama guru, kepala sekolah, dan pengawas untuk mengembangkan praktik terbaik PKB di sekolah masing-masing.

Kedua, dari perspektif perkembangan, hakikat isi PKB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan anak usia SD. Tugas perkembangan anak usia SD yang diutarakan Havighurst, antara lain belajar bergaul dengan teman sebaya, mengembangkan kecakapan dasar membaca, menulis, berhitung, mengembangkan kata hati, moralitas, dan skala nilai-nilai, dan mencapai kemandirian pribadi sebenarnya diwujudkan melalui kedelapan belas karakter di atas. Belajar bergaul dengan teman sebaya, misalnya, merupakan ladang subur untuk menumbuhkan karakter kejujuran, toleransi, cinta damai, atau tanggung jawab. Dalam pelaksanaannya guru perlu membedakan antara akuisisi karakter dan belajar karakter. Jika akuisisi karakter dilakukan melalui pembiasaan, belajar karakter merupakan aktivitas yang menyertakan pengembangan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Seperti dikemukakan di atas, Piaget dan Kohlberg telah membuka pemahaman tentang perkembangan kognitif dan moral. Nilai-nilai PKB dalam sudah dapat dibelajarkan di kelas melalui strategi yang memerhadapkan siswa dengan konflik moral. Tingkat perkembangan kognitif anak usia SD yang sudah memasuki tahap berpikir konkrit sejatinya dapat dimanfaatkan guru untuk mengkaji nilai-nilai karakter bangsa melalui fase eksplorasi, eksaminasi, integrasi, dan personalisasi. Pada fase personalisasi siswa sudah menjadikan nilai-nilai yang dibelajarkan melalui fase sebelumnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam kepribadiannya. Mereka akan merasa relaks dalam berperilaku.

Ketiga, kedudukan PKB dalam konstelasi pendidikan di SD yang tidak diposisikan sebagai mata pelajaran tersendiri menuntut kreativitas yang tinggi pada pihak guru. Ada sejumlah persoalan yang dihadapi oleh guru yang pantas dicermati. Guru SD di kelas rendah (1, 2, dan 3) mengintegrasikan PKB ke dalam pembelajaran tematik yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Guru SD di kelas tinggi (4, 5, dan 6) mengintegrasikan PKB ke dalam pembelajaran mata pelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Guru SD yang sudah terbiasa melaksanakan pembelajaran tematik hanya memerlukan sedikit penyesuaian. Jika mereka mampu memadukan kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan IPS ke dalam satu tema, penambahan beberapa karakter ke dalam tema tersebut, misalnya secara teknis tidak terlalu menyulitkan. Pada tataran praktis pelaksanaannya akan memerlukan energi ekstra pada pihak guru dan siswa.

6. Kesimpulan

Keterpentingan pendidikan karakter bangsa (PKB) bagi anak usia SD diyakini akan berbuah manis pada tahun-tahun mendatang jika ditemukan praktik terbaik dalam pembelajarannya. Praktik terbaik pembelajaran PKB sebagai suatu sistem menuntut guru untuk mempelajari terlebih dahulu konsep dasar PKB supaya tidak terjadi pemahaman yang artifisial sebagaimana kasus-kasus terdahulu yang teridentifikasi pada guru SD.

Praktik terbaik pembelajaran PKB menuntut guru untuk memahami peran guru sebagai pendidik dan kedudukan lembaga SD tempat mereka memberikan layanan profesional kepada manusia muda. Guru harus memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik perkembangan anak usia SD supaya dapat membantu anak dalam mempersonalisasikan nilai-nilai karakter bangsa melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

PKB merupakan upaya bangsa Indonesia untuk kembali kejati diri semula. Upaya ini harus dilakukan secara gradual, sebagai proses pembelajaran tanpa akhir, dan memerlukan praktik terbaik untuk melaksanakannya. Praktik terbaik hanya dapat dibangun melalui pengembangan profesi berjejaring mulai dari tingkat sekolah, lokal, regional, dan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, E. H. (1995). Parents as partners in education: Families and schools working together (4"). Englewood Cliffs, New Jersey: Merrill.
- BPPPK. (2007). Naskah akademik kajian kebijakan kurikulum SD. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, Kemdiknas.
- Eggen, P.D. & Kauchak, D. (1992). Educational psychology: Classroom connection. New York: Macmillan Publishing Company.
- Hasan, S.H., Wahab, A.Z., Mulyana, W., ..., Ismail, A.B. (2010) Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, Kemdiknas.
- Muro, J.J. & Kotman, T. (1995). Guidance and counseling in the elementary and middle schools. Dubuque, Iowa: Brown & Benchmark Company
- Siegler, R.S. & Alibali, M.W. (2005). Children's thinking (4"). Upper Saddle River New Jersey: Pearson.

AKTUALISASI PERAN GURU SEKOLAH DASAR SEBAGAI PENDIDIK KARAKTER BANGSA

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	asepjun.wordpress.com Internet Source	3%
2	id.scribd.com Internet Source	2%
3	core.ac.uk Internet Source	1%
4	tes.borneonews.co.id Internet Source	1%
5	chocopps.wordpress.com Internet Source	1%
6	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
7	yunifirwinda.blogspot.com Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

